

ABSTRAK

Pajak merupakan ilmu yang dinamis, perkembangan kondisi ekonomi dan sosial yang berlangsung sangat cepat mengakibatkan perlunya perubahan Peraturan perpajakan karena dianggap sudah tidak berlaku lagi dengan dunia usaha dan diperbaharui guna menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang terkandung didalamnya. Contohnya adalah Peraturan Perpajakan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang banyak mengalami perubahan. Perubahan Peraturan tersebut dimulai dari UU No. 17 Tahun 2000 yang disempurnakan dari UU No. 10 Tahun 1994, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 dan terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan UU Perpajakan yang Berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) distribusi Jawa Barat dan Banten yang beralamat di Jalan Asia Afrika No. 63 Bandung. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang berusaha untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu gambaran yang cukup jelas atas obyek yang diteliti dan diolah untuk ditarik simpulan. Untuk penelitian ini penulis menggunakan daftar gaji karyawan tahun 2007 dan bukti setoran pajak perusahaan sebagai dasar dalam perhitungan.

Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ./2000 dan Keputusan Menteri keuangan Nomor 564/KMK.03/2004, untuk melakukan perbandingan dengan Peraturan Perpajakan yang baru. Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan oleh penulis penerapan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 adalah merupakan penerapan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) karena PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan sendiri sebesar Rp 40.338.610 dan *take home pay* yang diterima oleh karyawan sebesar Rp 605.012.699. Kemudian perhitungan PPh Pasal 21 dengan tunjangan pajak ini sama halnya dengan Perusahaan memberikan tunjangan dasar, tunjangan jabatan dan tunjangan daerah maka PPh Pasal 21 sebesar Rp 41.832.610 dan *take home pay* Rp 613.535.309. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung Perusahaan ini merupakan kenikmatan bagi karyawan karena PPh Pasal 21 ditanggung Perusahaan dan perusahaan akan menjadikan sebagai beban yaitu sebesar Rp 40.338.610 dan *take home paynya* sebesar Rp 645.101.309 ini lebih besar dibandingkan dengan kedua perhitungan penerapan PPh Pasal 21 diatas.

Simpulan yang dapat diambil dari keseluruhan adalah Peraturan tahun 2000 dan Keputusan tahun 2004 sudah tidak diterapkan oleh PT. PLN (Persero). Perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan PT. PLN (Persero) adalah Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 ini lebih baik dibandingkan dengan alternatif pemungutan pajak yang lainnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Hasil Penelitian	4
1.5. Rerangka Pemikiran.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.2 Prinsip dan Azas-Azas Perpajakan	12
2.3 Pajak Penghasilan	15
2.3.1 Subyek Pajak Penghasilan	15
2.3.2 Obyek Pajak Penghasilan.....	16
2.4 Peraturan Yang Berkaitan Dengan PPh Pasal 21	17
2.4.1 KEP Dirjen No. 545/PJ/2000	17
2.4.2 KMK No. 466/KMK/No.04/2000.....	22
2.4.3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan	23
2.4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003	25
2.4.5 Peraturang pemerintah Nomor 47 Tahun 2003.....	25
2.4.6 KMK Nomor 486/KMK.03/2003	26

Halaman

2.5 Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	27
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal	27
2.5.2 Wajib Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	28
2.5.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	29
2.5.4 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak	30
2.5.5 Hak dan Kewajiban Subyek Pajak	34
2.5.6 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21	35
2.5.7 Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Ditanggung Pemerintah	37
2.5.7.1 Pengertian PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Pemerintah	37
2.5.7.2 Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Pemerintah	37
2.5.8 Tarif Pajak dan Perhitungan PPh Pasal 21	38
2.5.8.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	38
2.5.8.2 Perhitungan PPh Pasal 21	40
2.5.8.2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Atas Penghasilan Pegawai Tetap	40
2.5.8.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Atas Penghasilan Tidak Teratur	43
2.5.8.2.3 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tetap	45
2.5.8.2.4 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Sifatnya Tidak Tetap	46
2.5.8.2.5 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah	49
2.5.8.2.6 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Luar Negeri	50
2.5.9 Kelebihan Pemotongan Dan Penyetoran PPh Pasal 21	51
2.5.9.1 Surat Ketetapan Kurang Bayar	51
2.5.9.2 Surat Ketetapan Lebih Bayar	53

BAB III. METODE DAN OBYEK PENELITIAN.....	55
3.1 Obyek Penelitian.....	55
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	55
3.1.2 Struktur Organisasi	63
3.1.3 Uraian Tugas PT. PLN (Persero)	66
3.2 Metode Penelitian	71
3.2.1 Definisi Penelitian.....	71
3.2.2 Metode yang digunakan dalam penelitian	72
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	73
3.2.4 Waktu dan Lokasi Penelitian	74
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	 75
4.1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ./2000	76
4.1.1 Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ./2000	82
4.1.2 Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung PT.PLN (Persero) Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ./2000.....	85
4.1.3 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan tunjangan pajak PT.PLN (Persero) Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ./2000	87
4.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 Tentang Pajak Penghasilan	92
4.2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan PT.PLN (Persero) Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004.....	93
4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung PT.PLN (Persero) Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor	

	Halaman
564/KMK.03/2004	96
4.2.3 Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditunjang PT.PLN (Persero) Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/ 2004.....	98
4.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 Tentang Pajak Penghasilan	102
4.3.1 Analisis Penerapan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/ 2005.....	105
4.3.2 Analisis Penerapan PPh Pasal 21 yang ditanggung PT.PLN (Persero) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005.....	108
4.3.2 Analisis Penerapan PPh Pasal 21 dengan tunjangan Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005.....	111
4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 yang Diterapkan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten	115
4.5 Alternatif Penerapan PPh Pasal 21 yang dapat diterapkan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten	116
4.6 Perbandingan dari hasil analisis perhitungan PPh Pasal 21	117
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	122
5.1 Simpulan	122
5.2 Saran	123

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Tabel PTKP Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PK./2000	20
Tabel 2. 2 Tabel PTKP Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004	21
Tabel 2. 3 Tabel PTKP Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.03/2005	21
Tabel 2. 4 Tabel Tarif Pajak PPh Pasal 21.....	40
Tabel 4. 1 Perhitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 545/PJ./2000	83
Tabel 4. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Tunjangan Pajak Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 545/PJ/2000	86
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Ditanggung PT. PLN (Persero) Menurut Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor 545/PJ./2000.....	89
Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan PT.PLN (Persero) Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004	94
Tabel 4. 5 Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Tunjangan Pajak Menurut Keputusan	

Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004.....	97
Tabel 4. 6 Perhitungan PPh Pasal 21 Ditanggung PT. PLN (Persero) menurut	
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004.....	100
Halaman	
Tabel 4. 7 Perhitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan Menurut	
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005	106
Tabel 4. 8 Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Tunjangan Pajak Menurut Peraturan	
Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005	109
Tabel 4. 9 Perhitungan PPh Pasal 21 Ditanggung PT. PLN (Persero) Menurut	
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005	113
Tabel 4. 10 Perbandingan dari Hasil analisis PPh Pasal 21	118

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan
- Lampiran 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ.2000.
- Lampiran 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004.
- Lampiran 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005.
- Lampiran 5. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Bandung.
- Lampiran 6. Surat Setoran Pajak PT. PLN (Persero) Bandung.
- Lampiran 7. Daftar Gaji dan Perhitungan PPh Pasal 21 PT. PLN (Persero) Bandung.
- Lampiran 8. Surat Persetujuan Penelitian dari PT. PLN (Persero) Bandung.
- Lampiran 9. Surat Keterangan Penelitian dari PT. PLN (Persero) Bandung.